



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Prevent Strategy dalam Pengurangan Aksi Terorisme di
Inggris

Skripsi

Oleh

Xena Gunawan Tanudjojo

2016330212

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Prevent Strategy dalam Pengurangan Aksi Terorisme di Inggris

Skripsi

Oleh

Xena Gunawan Tanudjojo

2016330212

Pembimbing

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D.

Bandung

2019

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Xena Gunawan Tanudjojo
Nomor Pokok : 2016330212
Judul : *Prevent Strategy* dalam Pengurangan Aksi Terorisme di Inggris

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana

Pada Senin, 16 Desember 2019

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. I Nyoman Sudira

:

Sekretaris

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D.

:

Anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

:

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Xena Gunawan Tanudjojo

NPM : 2016330212

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : *Prevent Strategy* dalam Pengurangan Aksi Terorisme di Inggris

Dengan ini menyatakan bahwa rangkaian penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 2 Desember 2019

Xena Gunawan Tanudjojo

2016330212

ABSTRAK

Nama : Xena Gunawan Tanudjojo
NPM : 2016330212
Judul Skripsi : *Prevent Strategy* dalam Pengurangan Aksi Terorisme di Inggris

Prevent Strategy sebagai kebijakan kontra-terorisme di Inggris bertujuan untuk mengurangi terjadinya aksi terorisme, namun kebijakan ini tidak mencapai tujuannya karena terjadinya lima serangan terorisme pada tahun 2017. Penelitian ini telah mendeskripsikan “**Mengapa implementasi *Prevent Strategy*—sebagai tindakan kontra-terorisme—tidak mencapai tujuannya dalam mengurangi serangan terorisme di Inggris pada tahun 2017?**” Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif yang menganalisa proses sekuritisasi Inggris terhadap serangan terorisme pada tahun 2017 dan *Prevent Strategy* sebagai kebijakan kontra-terorisme Inggris. Penelitian ini memakai dua teori yaitu teori sekuritisasi dan *Social Identity Theory (SIT)*.

Penelitian ini memaparkan dua faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi *Prevent Strategy* sebagai kebijakan kontra-terorisme di Inggris. Faktor pertama adalah inkonsistensi dan kelemahan dari isi kebijakan dan implementasi *Prevent Strategy* yang menyebabkan timbulnya kontroversi dari berbagai pihak terutama kaum Muslim karena kebijakan ini dianggap diskriminatif dan bias. Faktor kedua merupakan mengakarnya *Islamophobia* di masyarakat Inggris yang menyebabkan kesulitan untuk menerapkan kebijakan tersebut dengan baik. Kondisi tersebut menimbulkan rasa permusuhan antara kaum Muslim dan non-Muslim yang menjadi suatu katalis dalam motif-motif serangan terorisme yang terjadi pada tahun 2017. Maka, *Prevent Strategy* yang seharusnya menjadi strategi kontra-terorisme di Inggris tidak mencapai tujuannya untuk mengurangi serangan terorisme yang terjadi pada tahun 2017 karena inkonsistensi dan kelemahan dalam implementasi dan isi kebijakan tersebut yang memicu perilaku *Islamophobia* yang telah berakar di antara masyarakat Inggris yang mempersulit implementasinya.

Kata kunci: *Prevent Strategy*, Inggris, kontra-terorisme, *Islamophobia*, terorisme pada tahun 2017, teori sekuritisasi, *Social Identity Theory (SIT)*.

ABSTRACT

Name : Xena Gunawan Tanudjojo
Student ID : 2016330212
Title : *Prevent Strategy* in the Reduction of Terrorism in the United Kingdom

Prevent Strategy as a counter-terrorism policy in the United Kingdom has an objective to reduce terrorism, but this policy failed to reach its objective because of the five terrorist attacks that happened in 2017. This paper described **“Why did the implementation of *Prevent Strategy*—as a counter-terrorism act—failed to achieve its goals in reducing terrorism in the United Kingdom in 2017?”** The methodology used in this paper is the qualitative method, analyzing the securitization process applied in the United Kingdom on the terrorism in 2017 and *Prevent Strategy* as United Kingdom’s counter-terrorism policy. Two theories applied in this paper are securitization theory and Social Identity Theory (SIT).

This paper described two factors that caused the failure of the implementation of *Prevent Strategy* as a counter-terrorism policy in United Kingdom. The first factor is the inconsistency and vulnerability in the content and implementation of *Prevent Strategy* which resulted in controversies from several actors, especially Muslim communities because this policy are perceived as discriminative and biased. The second factor is the roots of *Islamophobia* in the British society which caused several difficulties in implementing the policy. This condition provokes hostility between the Muslim and non-Muslim communities which turns into a catalyst for the motives of the terrorist attacks in 2017. Thus, *Prevent Strategy* that are meant to be a counter-terrorism policy in the United Kingdom failed to reach its objective in reducing terrorism in 2017 because of the inconsistency and vulnerability on the implementation and content of the policy itself, triggering *Islamophobic* behavior that has taken root among the British communities, complicating the implementation of the policy.

Keywords: *Prevent Strategy*, United Kingdom, counter-terrorism, *Islamophobia*, terrorism on 2017, securitization theory, Social Identity Theory (SIT).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pimpinan, berkat serta rahmatNya hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penelitian ini mendeskripsikan *Prevent Strategy* selaku kebijakan kontra-terorisme di Inggris yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya aksi terorisme. Kebijakan yang seharusnya mengamankan masyarakat Inggris tidak mencapai tujuannya dikarenakan terjadinya lima serangan besar pada tahun 2017. Gagalnya pencapaian kebijakan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti inkonsistensi dan kelemahan dalam implementasi kebijakan dan juga perilaku *Islamophobia* yang telah berakar di masyarakat Inggris.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan faktor yang menyebabkan *Prevent Strategy*--sebagai hasil dari sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Inggris terhadap ancaman terorisme yang terjadi—gagal dalam mencapai tujuannya. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi penulis dan pembaca untuk memahami bahwa faktor kegagalan implementasi *Prevent Strategy* bukan hanya karena inkonsistensi dan kelemahan dalam isi maupun implementasinya namun karena *Islamophobia* yang telah mengakar di masyarakat Inggris juga.

Melalui tulisan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung dan membantu dari awal penulisan sampai penyelesaian skripsi ini. Penulis tidak dapat menuliskan seluruh nama dari pihak-pihak yang telah mendukung dan tulisan ini merupakan sebagian dari rasa terima kasih saya terhadap seluruh pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan juga keluarga besar Lisandy dan Tanudjojo yang tidak henti-hentinya mendoakan, mendukung dan menyemangati dari awal studi sampai penyelesaian skripsi penulis.
2. Bapak Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan pengarahan, kritik dan saran selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu dan dorongannya agar

penulis dapat menyelesaikan skripsi dan sidang dalam waktu yang diharapkan.

3. Seluruh dosen/pengajar di HI Unpar yang telah membagikan ilmunya melalui proses belajar mengajar yang menginspirasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai topik skripsi ini. Terima kasih juga untuk Dr. I Nyoman Sudira dan Pak Adrianus Harsawaskita S.IP., M.A., selaku dosen penguji skripsi penulis untuk masukannya yang membuat skripsi ini lebih tajam dan terarah.
4. Geng Skripsi (Aldrich Suryawan, Chelsea Patricia, Elizabeth Novianty), terima kasih telah menjadi *support system* penulis selama proses penulisan skripsi. Terima kasih untuk segala candaan, tangisan, keputusan, motivasi dan waktu yang penuh *chaos* yang kita lewati bersama. Kehadiran kalian mengingatkan penulis bahwa penulis tidak menderita sendiri dalam proses penulisan skripsi. *Proud of us in finishing our thesis and graduating in 3.5 years!*
5. Alrafsya Saputra (Rio), kakak kelas semenjak SD-SMA dan menjadi kakak tingkat dalam kuliah di HI Unpar, terima kasih untuk seluruh diskusi dan bantuannya yang membantu kerangka berpikir penulis dalam proses penulisan skripsi semenjak penulis ada di kelas Seminar sampai skripsi ini selesai.
6. Delegaski Polski (Aldrich Suryawan, Alifah Budi N, Chelsea Patricia, Hana Novia, Juwita Putri T, M. Pringgodigdo/Edo, Raidilla Artia, Sabila Maraya, Talita Rizky A, Tania Gita S), terima kasih banyak telah menjadi penyemangat penulis dan menjadi teman-teman yang berjuang bersama dalam melewati Prakdip dalam semester tujuh ini. Terima kasih telah menjadi ‘keluarga’ suportif yang suka main U*O bersama, terima kasih untuk seluruh dukungan dan perhatian bagi penulis sampai selesainya skripsi ini.
7. Teman-teman di luar HI Unpar yang terus mendoakan dan menyemangati penulis dalam proses penulisan skripsi. Terima kasih atas perhatian kalian semua.

Terakhir, penulis tetap menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih membutuhkan perbaikan maka dari itu penulis memohon maaf atas kesalahan yang ada dalam penelitian ini. Penulis sangat terbuka akan kritik, saran, maupun masukan yang membangun terkait dengan penelitian ini.

Bandung, 7 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR DIAGRAM.....	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	4
1.2.2. Pembatasan Masalah	6
1.2.3. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4. Kajian Literatur	7
1.5. Kerangka Pemikiran	11
1.6. Metode Penelitian.....	23
1.6.1. Metode Penelitian.....	23
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.7. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PROSES SEKURITISASI TERHADAP ANCAMAN TERORISME DI INGGRIS.....	26
2.1. Terorisme sebagai Ancaman di Inggris	28

2.1.1.	Potensi Ancaman di Inggris	29
2.1.2.	Insiden Terorisme di Inggris pada Tahun 2017	32
2.1.3.	Dampak Politik dan Ekonomi terhadap Inggris	37
2.2.	Tindakan Pemerintah Inggris terhadap Terorisme	40
2.2.1.	Latar Belakang Tindakan Kontra-Terorisme di Inggris.....	41
2.2.2.	Pemerintah Inggris Sebagai <i>Securitizing Actor</i> pada Tahun 2017..	42
2.2.3.	<i>Speech Act</i> terhadap Insiden Terorisme pada Tahun 2017	45
2.2.4.	Respon dari Masyarakat Inggris sebagai <i>Audiences</i>	49
2.3.	Counter Terrorism Strategy (CONTEST)	53
2.3.1.	Isi CONTEST	55
2.3.2.	Prevent Strategy	60
2.3.3.	Implementasi Kebijakan <i>Prevent Strategy</i>	66
BAB III FAKTOR KEGAGALAN IMPLEMENTASI PREVENT STRATEGY		71
3.1.	Inkonsistensi dan Kelemahan dalam Pelaksanaan <i>Prevent Strategy</i>	71
3.1.1.	Inkonsistensi dalam Pelaksanaan <i>Prevent Strategy</i>	72
3.1.2.	Kelemahan dalam Pelaksanaan <i>Prevent Strategy</i>	77
3.1.3.	Kegagalan <i>Prevent Strategy</i>	82
3.1.4.	<i>Islamophobia</i> Sebagai Dampak dari Inefektivitas <i>Prevent Strategy</i>	83
3.2.	Mengakarnya <i>Islamophobia</i> di Inggris.....	89
3.2.1.	Akar <i>Islamophobia</i> di Inggris.....	90
3.2.2.	<i>Islamophobia</i> dalam Perspektif SIT	100
3.2.3.	<i>Islamophobia</i> dan Kesulitan Implementasi <i>Prevent Strategy</i>	104
3.2.4.	Dampak <i>Islamophobia</i> terhadap Masyarakat Inggris	110
3.2.5.	<i>Islamophobia</i> di Uni-Eropa	113
3.2.6.	Kegagalan <i>Prevent Strategy</i> sebagai Program Deradikalisasi	117
BAB IV KESIMPULAN.....		120
DAFTAR PUSTAKA		125

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. 1 Proses Sekuritisasi.....	13
Diagram 2. 1 Proses Sekuritisasi di Inggris terhadap Serangan Terorisme Tahun 2017.....	70
Diagram 3. 1 Insiden Anti-Muslim di Inggris.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hasil Survey Terhadap Masyarakat Inggris Mengenai Kemungkinan Terjadinya Terorisme	51
Gambar 2. 2 Model Pengurangan Bahaya CONTEST.....	57
Gambar 3.1 Populasi Masyarakat Muslim Tertinggi di Beberapa Area di Inggris	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 <i>Speech Act</i> oleh <i>Securitizing Actors</i>	48
Tabel 3.1 Faktor Kegagalan Implementasi <i>Prevent Strategy</i> dan Indikatornya .	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan negara seharusnya berhasil mencapai suatu tujuan yang spesifik untuk membawa masyarakatnya dalam kondisi yang lebih baik. Tujuan tersebut biasanya menjawab isu-isu atau kecemasan publik dalam berbagai sektor seperti sektor ekonomi, politik, keamanan atau lingkungan. Setiap kebijakan yang diterapkan pada masyarakat diharapkan diterima dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang lebih baik untuk pemerintah dan juga masyarakat.¹

Salah satu sektor yang mempunyai cukup banyak kebijakan adalah sektor keamanan dalam suatu negara. Semenjak era globalisasi, isu keamanan yang ada dalam dunia internasional sudah tidak lagi bersifat tradisional; terdapat banyak ancaman yang muncul dari aktor negara dan non-negara. Banyak sekali yang dapat menjadi ancaman, sebagai contohnya: permasalahan lingkungan, kejahatan transnasional, permasalahan kesehatan dan terorisme.

Terorisme telah menjadi suatu isu keamanan non-tradisional bagi berbagai negara dan mereka telah menerapkan kebijakan dalam sektor keamanan untuk memerangi terorisme. Salah satu contoh dari kebijakan dalam sektor keamanan yang sukses diimplementasikan adalah *Common Security and Defence Policy*

¹ Paul Cairney, *Understanding Public Policy: Theories and Issues*, (London: Palgrave Macmillan, 2012), 4-5.

(CSDP) yang berisi struktur militer dan politik dari *European Union* (EU) dan salah satu tujuan mereka adalah melawan terorisme.² Dalam kawasan Eropa, isu terorisme bukan suatu hal yang baru muncul. Beberapa negara yang mengalami angka kematian yang tinggi karena serangan terorisme di Eropa ialah sebagai berikut: Rusia, Inggris, Ukraina, Spanyol dan Perancis.³

Inggris menjadi salah satu negara yang sudah tidak lagi asing dengan aksi terorisme. Inggris sendiri telah mengalami serangan terorisme semenjak abad ke 16 dari berbagai pihak seperti Irish Republican Army (IRA)⁴, Al-Qaeda dan ISIS. Sebagai contohnya, serangan bom yang terjadi pada 7 Juli 2005 dilakukan oleh empat pelaku bom bunuh diri yang dicurigai telah terkena radikalisis yang dilakukan oleh Al-Qaeda.⁵ Sebagai respons, Inggris merancang tindakan kontra-terorisme berisi berbagai kebijakan dari serangan yang terjadi.

² *Implementation Plan on Security and Defence*, European External Action Service, (Brussels, Belgium, 2016).

³ 1. Chris Alcantara, "46 years of terrorist attacks in Europe, visualized," *The Washington Post*, 17 Juli 2017, <https://www.washingtonpost.com/graphics/world/a-history-of-terrorism-in-europe/>, 2.

2. "Terrorism," *European Commission*, diakses 19 November 2019, https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/changing-security-paradigm/impact-terrorism_en.

3. Megan Trimble, "Globally Terrorism Deaths Are On the Decline," *U.S. News & World Report*, 5 Desember 2018, <https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2018-12-05/global-terrorism-deaths-down-globally-right-wing-terror-on-rise>.

⁴ 1. Joseph McQuade, "Terrorism in Britain: a brief history," *The Conversation*, 25 May 2017, <https://theconversation.com/terrorism-in-britain-a-brief-history-78362>.

2. Tom Michael, "How many terror attacks have there been in the UK and what is the definition of terrorism?" *The Sun*, 28 Juni 2019, <https://www.thesun.co.uk/news/3857950/terror-attack-definition-uk-response-tips/>.

3. Ashley Kirk, "How many people are killed by terrorist attacks in the UK?" *The Telegraph*, 17 Oktober 2017, <https://www.telegraph.co.uk/news/0/many-people-killed-terrorist-attacks-uk/>.

⁵ Michael Ray, "London bombings of 2005," *Britannica*, 17 Agustus 2018, diakses pada 20 Maret 2019, <https://www.britannica.com/event/London-bombings-of-2005>, "7 July London bombings: What happened that day?" *BBC*, 3 Juli 2015, <https://www.bbc.com/news/uk-33253598>., Alan Cowell, "After Coordinated Bombs, London Is Stunned, Bloodied and Stoic," *The New York Times*, 7 Juli 2005, <https://www.nytimes.com/2005/07/07/international/europe/after-coordinated-bombs-london-is-stunned-bloodied-and.html>.

Tindakan kontra-terorisme yang ditetapkan oleh suatu negara akan menjadi salah satu langkah dalam proses sekuritisasi negara mereka. Di Inggris, tindakan sekuritisasi yang mereka coba terapkan setelah serangan bom pada Juli 2005 adalah *Prevent Strategy* yang termasuk dalam salah satu strategi kontra-terorisme. *Prevent Strategy* merupakan suatu nama dari kebijakan dalam strategi kontra-terorisme di Inggris pada tahun 2003 setelah serangan 9/11 dengan tujuan spesifik untuk menghindari radikalisme yang terjadi terhadap individual dan tujuan utama untuk mengurangi terorisme di Inggris.⁶

Melalui penerapan *Prevent Strategy* sebagai kebijakan kontra-terorisme, Inggris bertujuan untuk mengurangi aksi terorisme yang terjadi di Inggris dengan cara membantu orang-orang yang rentan akan ikut grup ekstremis atau akan melakukan kegiatan teroris. Dalam prakteknya, polisi dan lembaga publik diminta untuk bekerjasama dengan orang-orang yang mempunyai profesi di antara masyarakat seperti pemimpin agama dan dokter untuk melaporkan kecurigaan-kecurigaan mereka ke *Prevent body* dan dari situ akan dilakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai dan barulah keputusan diambil apakah orang tersebut harus diklasifikasi sebagai ancaman.⁷

⁶ Fahid Qurashi, "The Prevent Strategy and the UK 'war on Terror': Embedding Infrastructures of Surveillance in Muslim Communities," *Palgrave Communications* 4, no. 1 (2018): 17, doi:10.1057/s41599-017-0061-9.

⁷ *CONTEST The United Kingdom's Strategy for Countering Terrorism*, Home Office (London, UK, 2018).

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Inggris merupakan sebuah negara yang merancang kebijakan-kebijakannya dengan terintegrasi namun *Prevent Strategy* yang dirancang sebagai salah satu tindak kontra-terorisme tidak mencapai tujuannya. Inggris menjadi salah satu negara di Eropa yang paling sering terkena serangan terorisme, dalam jangka waktu tahun 1970-2016 Inggris telah mengalami 1.622 penyerangan yang menyebabkan 2.519 kematian.⁸ Beberapa serangan terorisme yang paling mematikan terhadap Inggris dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Islam fundamentalis dan ini menyebabkan meningkatnya kecurigaan dan prasangka yang buruk masyarakat Inggris terhadap kaum Muslim. Sebagai contoh, pengeboman London 2005 yang juga dikenal sebagai serangan 7/7 dilakukan oleh empat orang Muslim radikal yang mempunyai hubungan dengan Al-Qaeda.⁹ Kejadian ini menjadi sebuah *turning point* bagi Inggris dalam mengimplementasikan strategi kontra-terorisinya.

Untuk menanggulangi isu terorisme yang terjadi, pemerintah Inggris melakukan sekuritisasi dengan bentuk penerapan *Prevent Strategy*. *Prevent Strategy* adalah salah satu kebijakan dalam Counter-Terrorism Strategy

⁸ 1. Chris Alcantara, "46 years of terrorist attacks in Europe, visualized," *The Washington Post*, 17 Juli 2017, <https://www.washingtonpost.com/graphics/world/a-history-of-terrorism-in-europe/>.,

2. Tom Michael, "How many terror attacks have there been in the UK and what is the definition of terrorism?" *The Sun*, 28 Juni 2019, <https://www.thesun.co.uk/news/3857950/terror-attack-definition-uk-response-tips/>.,

3. Anthony Cordesman, "Trends in European Terrorism: 1970-2016," *Center for Strategic & International Studies*, 18 Agustus 2017, [csis.org/analysis/trends-european-terrorism-1970-2016](https://www.csis.org/analysis/trends-european-terrorism-1970-2016).

⁹ *Report of the 7 July Review Committee*, Greater London Authority (London, UK, 2006).

(CONTEST) yang merupakan strategi kontra-terorisme pemerintah Inggris.¹⁰ Namun sejak pertama kali kebijakan ini dibuat pada tahun 2003¹¹, implementasi kebijakan ini belum terlihat dengan efektif karena jumlah aksi terorisme bukannya berkurang seiring berjalannya waktu, melainkan tetap ada dan malah meningkat. Sebagai buktinya, masih ada serangan-serangan yang terjadi pada tahun 2007, 2011, 2013, 2016 dan 2017.¹² Penyerangan yang terjadi juga terus memuncak sampai tahun 2017 dimana terjadi lima serangan terorisme besar dalam satu tahun. Adanya implementasi *Prevent Strategy* ini juga meningkatkan perilaku *Islamophobia* terhadap kaum Muslim yang tinggal di Inggris.¹³ Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pemicu serangan-serangan yang terjadi di Inggris.

¹⁰ "Prevent: UK's Counter Terrorism Strategy," *Economic & Social Research Council*, diakses pada 28 Februari 2019, <https://esrc.ukri.org/public-engagement/social-science-for-schools/resources/prevent-the-uk-s-counter-terrorism-strategy/>

¹¹ 1. Full Fact Team, "What Is the Prevent Strategy?" *Full Fact*, 7 Agustus 2017, <https://fullfact.org/law/what-prevent-strategy/>,

2. Jamie Grierson, "Prevent strategy: your questions answered," *The Guardian*, 6 Oktober 2019, <https://www.theguardian.com/uk-news/2019/oct/06/prevent-strategy-your-questions-answered.>,

3. Helen Warrell, "Inside Prevent, the UK's controversial anti-terrorism programme," *Financial Times*, 24 Januari 2019, <https://www.ft.com/content/a82e18b4-1ea3-11e9-b126-46fc3ad87c65>.

¹² 1. Quartz Staff, "A timeline of deadly terror attacks in the UK since 2005," *Quartz*, 4 Juni 2017, <https://qz.com/998276/a-timeline-of-deadly-terrorist-attacks-in-the-uk-since-2005/>,

2. Owen Bowcott, "UK terror attacks since 11 September 2001," *The Guardian*, 22 Maret 2017, <https://www.theguardian.com/uk-news/2017/mar/22/uk-terror-attacks-since-11-september-2001.>,

3. "Britain suffers its worst terrorist attack since 2005," *The Economist*, 25 Maret 2017, <https://www.economist.com/britain/2017/03/25/britain-suffers-its-worst-terrorist-attack-since-2005>.

¹³ 1. "Prevent scheme 'built on Islamophobia and should be axed'," *BBC*, 29 Agustus 2017, diakses pada 20 Maret 2019, <https://www.bbc.com/news/uk-england-41082086>,

2. Jamie Grierson, "'My so was terrified': how Prevent alienates UK Muslims," *The Guardian*, 27 Januari 2019, <https://www.theguardian.com/uk-news/2019/jan/27/prevent-muslim-community-discrimination.>,

3. Helen Warrell, "Inside Prevent, the UK's controversial anti-terrorism programme," *Financial Times*, 24 Januari 2019, <https://www.ft.com/content/a82e18b4-1ea3-11e9-b126-46fc3ad87c65>.

Pada tahun 2017 terjadi lima serangan besar di Inggris yang terjadi di: Westminster, Manchester Arena, London Bridge, Finsbury Park dan Parsons Green.¹⁴ Kelima serangan tersebut merupakan serangan yang cukup besar dan diliput oleh media. Maka dapat disimpulkan bahwa *Prevent Strategy* yang seharusnya menjadi salah satu strategi untuk mengurangi aksi terorisme di Inggris tidak mencapai tujuannya. Walaupun telah diberlakukan terhadap seluruh wilayah di Inggris, tetap saja kebijakan ini tidak memenuhi fungsinya untuk mengurangi terorisme.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Fokus penulis ada dalam *Prevent Strategy* yang diimplementasikan oleh pemerintah Inggris dan faktor yang membuat kebijakan tersebut tidak mencapai tujuannya. Penulis memilih tahun 2017 karena pada tahun 2017 terjadi lima serangan besar di Inggris dan *Prevent Strategy* yang diberlakukan sebagai hasil proses sekuritisasi. Namun, kebijakan ini tidak mencapai tujuannya dalam mengurangi terorisme. Teori sekuritisasi digunakan untuk membatasi penelitian penulis mengenai proses sekuritisasi yang dilakukan Inggris. Selain itu, penulis membatasi penelitian terhadap mengakarnya *Islamophobia* di antara masyarakat Inggris dengan *Social Identity Theory*.

1.2.3. Perumusan Masalah

Respons yang dilakukan oleh pemerintah Inggris terkait aksi terorisme yang terjadi dapat dilihat sebagai tindakan sekuritisasi yang dengan cepat

¹⁴ *European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018*, Europol, (The Hague, Netherlands, 2018).

diterapkan. Namun, tindakan kontra-terorisme ini malah menjadi suatu katalis dalam meningkatkan perilaku *Islamophobia* terhadap masyarakat di Inggris. Maka, dari pembatasan masalah yang ada, muncul suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut: **Mengapa implementasi *Prevent Strategy*—sebagai tindakan kontra-terorisme—tidak mencapai tujuannya dalam mengurangi serangan terorisme di Inggris pada tahun 2017?**

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengapa *Prevent Strategy* tidak mencapai tujuannya sebagai instrumen kebijakan untuk mengurangi aksi terorisme di Inggris. Penulis ingin menghubungkan proses sekuritisasi dan faktor perilaku *Islamophobia* dalam masyarakat Inggris yang membuat kebijakan tersebut tidak dapat mencapai tujuannya pada tahun 2017.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan:

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi para peminat studi isu non-tradisional yang mempelajari topik kontra-terorisme dan kebijakan negara dalam proses sekuritisasi untuk dijadikan referensi.

1.4. Kajian Literatur

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian literatur sebagai referensi dan juga untuk mencari bahan literatur yang dapat mendukung penelitian yang

dilakukan. Terdapat banyak literatur yang membahas mengenai *Prevent Strategy* dan juga *Islamophobia* di Inggris. Penulis mengkaji tiga bahan literatur yaitu *Limits of UK Counterterrorism Policy and its Implications for Islamophobia and Far Right Extremism* oleh Tahir Abbas dan Imran Awan (2015), *The Prevent Strategy and the UK 'war on terror': embedding infrastructures of surveillance in Muslim communities* oleh Fahid Qurashi (2018) dan *Islam, "War on Terror" and the Future of Muslim Minorities in the United Kingdom: Dilemmas of Multiculturalism in the Aftermath of the London Bombings* oleh Javaid Rehman (2007).

Literatur yang pertama dikaji berjudul *Limits of UK Counterterrorism Policy and its Implications for Islamophobia and Far Right Extremism* yang ditulis oleh Tahir Abbas dan Imran Awan pada tahun 2015. Dalam literatur ini, Abbas dan Awan membahas tentang Counter-Terrorism and Security Act 2015 yang diperbaharui oleh pemerintah Inggris untuk menanggulangi ancaman dari kekerasan ekstremis. Literatur ini membahas dan mengkritik kebijakan kontra-terorisme yang dilakukan oleh Inggris dimana kebijakan yang ada membuat satu persepsi terhadap komunitas yang dicurigai yang berisi kaum Muslim. Hal ini menyebabkan pengasingan kaum Muslim dalam masyarakat yang akan membuat mereka mempertanyakan tindakan pemerintah mengenai kebijakan yang mereka buat. Menurut Abbas dan Awan, kebijakan seperti ini akan menyebabkan suatu normalisasi *Islamophobia* yang akan menyebabkan peningkatan serangan ekstremis. Fokus kaum Muslim dalam tulisan mereka adalah kaum Muslim yang masih muda berkebangsaan Inggris, situasi budaya, sosial dan politik yang

mengalienasi mereka akan menyebabkan mereka untuk berbalik melawan negara mereka sendiri. Dengan implementasi kebijakan yang bersifat *Islamophobia*, para kaum Muslim, khususnya mereka yang masih muda dan berkebangsaan Inggris dapat dengan mudah terkena radikalisisasi dan mereka bisa saja pergi ke Irak dan Suriah untuk berperang bagi ISIS atau menjadi salah satu simpatisan ISIS dan menjadi ancaman bagi keamanan nasional Inggris dengan melakukan pengeboman. Inilah tantangan dari kebijakan kontra-terorisme Inggris yang telah diperbaharui pada tahun 2015.¹⁵

Sedangkan literatur kedua yang berjudul *The Prevent Strategy and the UK 'war on terror': embedding infrastructures of surveillance in Muslim communities* oleh Fahid Qurashi pada tahun 2018 membahas strategi Inggris dalam metode “war on terror” yang dilakukan terhadap komunitas Muslim dengan melakukan pengawasan penuh terhadap mereka. Dalam literatur ini, Qurashi berfokus pada *Prevent Strategy* yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada tahun 2003 sebagai salah satu aksi kontra-terorisme sesudah tragedi 9/11 yang dimaksudkan untuk menghindari radikalisme individual terhadap terorisme. Pada tahun 2015, *Prevent Strategy* wajib diberlakukan terhadap masyarakat. Qurashi melakukan wawancara, berdiskusi dan melakukan observasi untuk melihat kegunaan dari pengawasan ketat yang menjadi pokok utama dari strategi *Prevent Strategy*. Menurut pihak yang berwenang, radikalisisasi adalah suatu faktor utama dalam munculnya terorisme dan mereka berpikir bahwa pencegahan dapat dilakukan secepatnya untuk menghindari lebih banyak lagi serangan yang akan terjadi. Hal

¹⁵ Tahir Abbas and Imran Awan, "Limits of UK Counterterrorism Policy and Its Implications for Islamophobia and Far Right Extremism," *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 4, no. 3 (2015): 16-29, doi:10.5204/ijcjsd.v4i3.241.

ini menunjukkan bagaimana *Prevent Strategy* sendiri telah menginternalisasi *Islamophobia* dengan fokusnya untuk mengawasi komunitas Muslim yang berada di Inggris.¹⁶

Islam, "War on Terror" and the Future of Muslim Minorities in the United Kingdom: Dilemmas of Multiculturalism in the Aftermath of the London Bombings ditulis oleh Javaid Rehman pada tahun 2007. Jurnal artikel ini ditulis setelah terjadinya pengeboman di London pada tahun 2005 dan membahas mengenai kondisi komunitas Muslim berkewarganegaraan Inggris yang didiskriminasi dan diperlakukan secara tidak adil karena identitas mereka. Tindakan kontra-terorisme yang diambil Inggris setelah kejadian bom London cenderung menargetkan kaum Muslim dan mereka juga mengalami masalah-masalah berhubungan dengan aspek sosial dan politik. Rehman percaya bahwa kaum Muslim seharusnya masih dihargai dan dianggap di antara masyarakat Inggris.¹⁷

Dari ketiga literatur yang ditinjau, dapat dilihat bahwa ada hubungan antara metode kontra-terorisme dan *Islamophobia* yang sangat kuat di Inggris. Literatur yang pertama menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Inggris membuat suatu kebijakan kontra-terorisme yang dianggap menginternalisasi *Islamophobia* dan membangkitkan suatu stigma yang buruk terhadap komunitas beragama Muslim. Alienasi terhadap komunitas beragama Muslim ini dapat menyebabkan kaum Muslim yang ada di Inggris untuk terkena radikalisisasi dengan mudah

¹⁶ Fahid Qurashi, "The Prevent Strategy and the UK 'war on Terror': Embedding Infrastructures of Surveillance in Muslim Communities," *Palgrave Communications* 4, no. 1 (2018): 17-30, doi:10.1057/s41599-017-0061-9.

¹⁷ Javaid Rehman, "Islam, 'War on Terror' and the Future of Muslim Minorities in the United Kingdom: Dilemmas of Multiculturalism in the Aftermath of the London Bombings," *Human Rights Quarterly* 29, no.4 (2007): 831-878, doi: 10.1353/hrq.2007.0047.

sehingga mereka dapat menjadi anggota atau simpatisan ISIS dan menjalankan ‘tugas’ yang diberikan dengan melakukan serangan-serangan teror.

Sedangkan literatur kedua menunjukkan bukti konkrit bahwa dalam metodenya untuk melakukan “*war on terror*”, Inggris sebagai negara telah melakukan perilaku *Islamophobia* terhadap komunitas Muslim yang adalah warga negara mereka yang seharusnya mereka lindungi. Tetapi melalui *Prevent Strategy*, privasi dan juga hak asasi dari komunitas Muslim seakan dilecehkan karena pengawasan yang telah ditanam ke dalam infrastruktur hanya untuk mengawasi komunitas mereka.

Literatur yang terakhir memberikan suatu bukti bahwa tindakan kontra-terorisme yang dilakukan oleh Inggris bersifat bias dan kontroversial. Komplain yang datang dari kaum Muslim disebabkan oleh masalah-masalah yang mereka alami secara sosial dan politik. Perilaku yang mereka rasakan adalah perilaku *Islamophobic* dan penulis mempertanyakan status Inggris sebagai negara yang menjunjung multikulturalisme.

1.5.Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dipakai untuk membantu penulis meneliti dan menganalisa permasalahan yang dibahas. Dalam tulisan ini, penulis memakai tiga teori dan tiga konsep yang dapat menjelaskan dan membangun suatu analisis dalam melihat mengapa *Prevent Strategy* tidak mencapai tujuannya dalam mengurangi aksi terorisme yang terjadi pada tahun 2017.

Teori pertama yang dipakai untuk menganalisa rumusan masalah adalah teori sekuritisasi untuk memaparkan bagaimana isu terorisme di Inggris telah

menjadi satu isu serius yang dapat mengancam keamanan nasional. *Prevent Strategy* merupakan suatu hasil dari proses sekuritisasi yang dilakukan terhadap isu terorisme. Pengertian sekuritisasi sendiri muncul dari Copenhagen School pada tahun 1980an yang bergeser dari pemikiran kajian keamanan tradisional yang hanya berfokus pada isu-isu tradisional yang hanya membahas sektor militer. Menurut Copenhagen School, keamanan berarti pertahanan hidup; ketika suatu isu muncul dan menjadi ancaman terhadap sebuah *referent object* (dalam keamanan tradisional obyek ini adalah negara tetapi tidak selalu mengacu pada negara jika dibahas dalam konteks keamanan non-tradisional) maka ancaman yang dialami harus ditangani secara langsung dan efektif. Tujuan dari teori ini adalah untuk mencapai tahap desekuritisasi yang berarti isu atau ancaman sudah tidak ada dalam darurat lagi dan dapat ditangani secara normal.¹⁸

Beberapa pemikir dalam studi ini di antaranya ada Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. Dalam buku *Security: A New Framework For Analysis* terdapat 5 sektor dalam kajian keamanan non-tradisional yaitu *military sector, political sector, social sector, economic sector* dan *environmental sector*.¹⁹ Teori sekuritisasi merupakan suatu proses dimana aktor-aktor tertentu (*securitizing actors*) menyatakan adanya isu (*existential threat*) terhadap pendengar (*audiences*); isu tersebut disampaikan melalui pernyataan (*speech act*) yang memberitahukan adanya ancaman dari ketahanan sebuah objek (*referent object*).²⁰

¹⁸ Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap De Wilde, *Security a New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner, 2013), 21.

¹⁹ *Ibid*, 7-8.

²⁰ *Ibid*, 23-26.

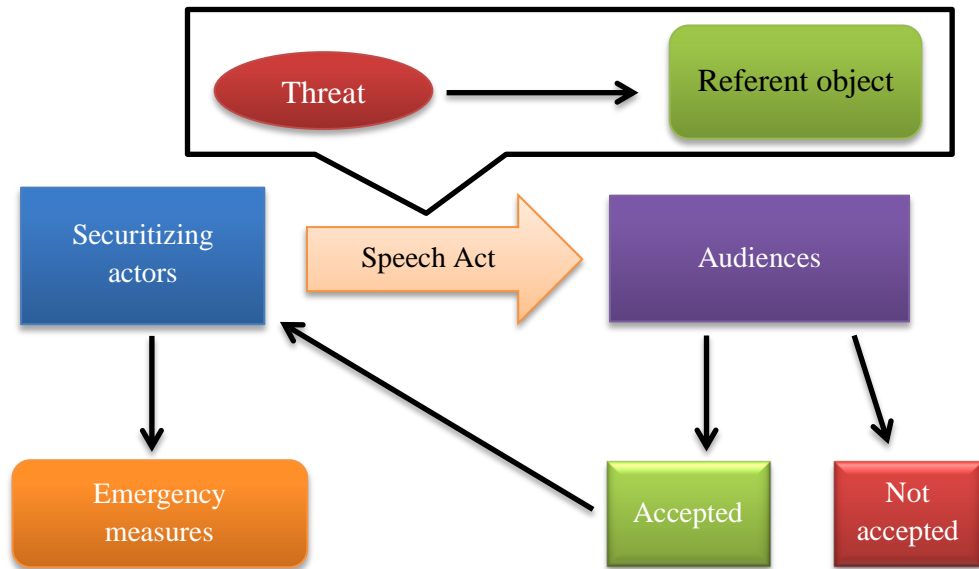


Diagram 1. 1 Proses Sekuritisasi²¹

Diagram 1.1 di atas memberikan ilustrasi mengenai proses sekuritisasi yang dirumuskan oleh Buzan dalam bukunya. Namun pada kenyataannya, tidak semudah itu untuk menjadikan suatu hal menjadi isu keamanan karena pada saat *securitizing actors*, dalam penelitian ini beberapa aktor dalam pemerintahan, melakukan *securitizing move* (menyatakan suatu isu berbahaya atau tidak) mereka harus mendapatkan persetujuan pada pendengar yang ditargetkan yaitu masyarakat. Ketika isu dapat diterima, pemerintah dapat melakukan tindakan darurat (*emergency measures*) untuk menanganinya. Jika isu tersebut tidak disetujui oleh pendengar yang ditargetkan, maka dapat dikatakan bahwa proses sekuritisasi yang dilakukan gagal.²²

Dalam hal ini, sekuritisasi yang dilakukan di Inggris jatuh dalam *societal security* dikarenakan *referent object* dari proses sekuritisasi tersebut adalah

²¹ Diagram diturunkan dari Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obro Indonesia, 2017), 179-180.

²² Buzan, *Security a New Framework for Analysis*, 25.

keamanan masyarakat di Inggris. Ancaman terorisme pada tahun 2017 yang dilakukan oleh individu-individu yang mengaku warga negara Inggris mengancam keselamatan masyarakat Inggris. Maka, pemerintah Inggris selaku *securitizing actor* melakukan *securitizing move* untuk meyakinkan masyarakat Inggris akan ancaman yang disebabkan oleh serangan terorisme. Penerimaan masyarakat Inggris terhadap *speech act* yang dilakukan pemerintah Inggris memperbolehkan mereka untuk mengambil suatu tindakan darurat untuk menangani isu tersebut. Implementasi dari *Prevent Strategy* dapat dideskripsikan melalui teori sekuritisasi sebagai *emergency measures* dalam mengamankan masyarakat Inggris dari ancaman yang ada.

Ada beberapa persyaratan yang harus dicapai dalam proses sekuritisasi agar dianggap berhasil. Pertama, *securitizing actor* harus memiliki kemampuan untuk meyakinkan *audience* mengenai ancaman terhadap *referent object* yang dapat berakibat berbahaya jika tidak ditangani secara tepat dan langsung. Kedua, *speech act* menjadi media untuk meyakinkan *audience* mengenai ancaman yang ada maka pemilihan jargon dan istilah yang tepat dalam *speech act* merupakan hal yang penting. Ketiga, *audience* harus mempunyai tingkat pendidikan yang memadai dan akses informasi yang cukup agar dapat menangkap pesan yang disampaikan oleh *securitizing actors* mengenai bahaya yang mengancam mereka agar respons yang mereka keluarkan dapat menghasilkan tindakan yang rasional. Keempat, kondisi sosial dan ekonomi dalam negara tersebut dimana proses

sekuritisasi dilakukan haruslah tepat agar proses sekuritisasi dapat dijalankan dengan baik.²³

Melihat terorisme sebagai sebuah isu utama yang dibahas dalam penelitian ini, maka definisi terorisme harus dijelaskan. Menurut Andrea Locatelli, definisi sistematis dari terorisme terbentuk dari lima elemen yaitu: 1) penggunaan kekerasan; 2) tujuan atau/dan efek politik; 3) pendekatan tidak langsung; 4) pelanggaran dari aturan-aturan yang telah diterima; 5) kekuatan relatif dalam penyerangan daripada pertahanan.²⁴ Sebenarnya, mendefinisikan terorisme bukan suatu hal yang mudah karena hal ini masih diperdebatkan oleh akademisi sampai saat ini, namun setidaknya beberapa akademisi mencoba untuk mendefinisikan terorisme berdasarkan jurnal akademis yang mereka telah baca.

Definisi yang dipakai oleh banyak akademisi adalah definisi terorisme menurut Schmid dan Jongman. Menurut mereka, terorisme merupakan suatu metode yang menimbulkan kecemasan dengan pengulangan aksi kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau aktor negara untuk mencapai alasan idiosinkratis, kriminal atau politik dimana target langsung dari kekerasan tersebut bukanlah target utama. Korban dari kekerasan tersebut dapat dipilih secara acak atau dipilih secara selektif dan mereka menjadi media penyampai pesan. Ancaman dan kekerasan yang dilakukan merupakan suatu proses komunikasi antara pelaku, korban dan target utama yang dipakai untuk memanipulasi target utama untuk

²³ Buzan, *Security a New Framework for Analysis*, 28.

²⁴ Andrea Locatelli, "What is terrorism? Concepts, definitions and classifications," *Understanding Terrorism (Contributions to Conflict Management, Peace Economics and Development* 22 (2014): 8-9.

mencapai agenda pelaku melalui intimidasi, koersi atau propaganda.²⁵ Sampai saat ini belum ada definisi universal dari terorisme namun pada penelitian ini definisi Schmid dan Jongman yang dipakai. Penyerangan-penyerangan yang terjadi di Inggris pada tahun 2017 dapat diklasifikasikan sebagai aksi terorisme menurut definisi tersebut.

Prevent Strategy merupakan suatu kebijakan yang dirancang oleh pemerintah Inggris dan pembentukan kebijakan ini dapat dijelaskan melalui kerangka *National Security Policy* (NSP) yang dibentuk berdasarkan model *public policy process* oleh Susan J. Buck.²⁶ Secara singkat, *public policy* atau kebijakan publik menurut Richards dan Smith adalah istilah umum yang menjelaskan keputusan atau rencana tindakan yang dilakukan oleh aktor, yaitu pemerintah atau organisasi pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan.²⁷ NSP merupakan kerangka yang dipakai untuk membahas *Prevent Strategy*.

NSP menjelaskan bagaimana cara sebuah negara mengamankan negara dan juga masyarakatnya yang dijelaskan biasanya melalui sebuah dokumen yang disebar. ²⁸ Biasanya dokumen tersebut dapat disebut dengan sebutan lain seperti rencana, strategi, konsep atau doktrin.²⁹ *Prevent Strategy* merupakan suatu kebijakan dalam strategi kontra-terorisme Inggris yang disebut CONTEST.

²⁵ Alex P. Schmid dan Albert J. Jongman, *Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature*, 2nd ed. (Piscataway: Transaction Publishers, 1988).

²⁶ Susan J. Buck, *Understanding Environmental Administration and Law, 3rd Edition*, 3rd ed. (Washington: Island Press, 2006), 34.

²⁷ David Richards and Martin Smith, *Governance and Public Policy in the UK*, (Oxford: Oxford University Press, 2002), 1.

²⁸ *National Security Policy*, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, (Geneva, Switzerland, 2005).

²⁹ *Ibid.*

Implementasi dari *Prevent Strategy* dalam mencapai tujuannya merupakan hal yang penting untuk melihat kualitas dari kebijakan yang dibuat, kesuksesan dari sebuah kebijakan tidak hanya dilihat dari perancangannya namun juga implementasinya.³⁰ Menurut Anisur Khan, performa dari implementasi sebuah kebijakan dapat dilihat dari tiga sisi: 1) hasil akhir dari kebijakan; 2) dampak dari kebijakan; 3) perhitungan apakah kebijakan tersebut telah membawa kemajuan terhadap negara/masyarakat secara keseluruhan.³¹

Istilah radikalisasi juga didefinisikan dalam bagian ini agar tidak menimbulkan kerancuan atau kebingungan dalam penelitian. Sampai saat ini belum ada definisi dari istilah ini secara umum, penulis memakai dua definisi dari radikalisasi yang saling berhubungan di dalam penelitian ini. Definisi pertama dari Wilner dan Dubouloz adalah radikalisasi sebagai proses ketika individu menganut ide-ide politik, sosial atau/dan religius secara ekstrim dan ketika mereka menganggap kekerasan sebagai suatu cara yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Proses ini merupakan sebuah proses mental dan emosional yang membentuk perilaku individu cenderung kepada kekerasan.³² Definisi ini berhubungan dengan definisi selanjutnya yang dirumuskan oleh McCauley dan Moskalenko yang mendeskripsikan radikalisasi sebagai peningkatan secara ekstrim dalam kepercayaan, perasaan dan perilaku yang membenarkan kekerasan antar kelompok dan membutuhkan pengorbanan untuk membela “*in-group*”.

³⁰ Derick W. Brinkerhoff dan Benjamin Crosby, *Managing Policy Reform: Concepts and Tools for Decision-makers in Developing and Transitioning Countries*, (Sterling: Kumarian Press, 2002).

³¹ Anisur Rahman Khan, “Policy Implementation: Some Aspects and Issues,” *Journal of Community Positive Practices* 16, no.3 (2016): 7, DOI: 10.13165/VPA-16-15-4-02.

³² Alex S. Wilner dan Claire J. Dubouloz, “Homegrown terrorism and transformative learning: an interdisciplinary approach to understanding radicalization,” *Global Change, Peace & Security* 22, no.1 (2010): 38, <https://doi.org/10.1080/14781150903487956>.

Kedua definisi dari istilah tersebut mempunyai kesamaan yaitu proses perubahan kepercayaan dan perilaku individu yang menganggap bahwa kekerasan adalah suatu hal yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan atau membela “*in-group*”. Penjelasan lebih jauh mengenai “*in-group*” dibahas dalam bagian *Social Identity Theory*. Dalam penelitian ini, definisi radikalisis yang dipakai akan mengacu pada definisi yang telah dideskripsikan di atas.

Selain itu, teori deradikalisis juga dipakai untuk menjelaskan *Prevent strategy* sebagai kebijakan kontra-terorisme yang dapat dianggap sebagai sebuah kebijakan yang menerapkan deradikalisis. Menurut Daniel Koehler, teori deradikalisis muncul sebagai *counter-part* dari teori dan model yang ada mengenai radikalisis. Salah satu teori deradikalisis yang diperkenalkan dalam ranah radikalisis merupakan suatu model proses pelepasan atau deradikalisis yang terjadi melewati tiga perubahan identitas yang terjadi dalam lima aspek kehidupan yaitu relasi sosial, cara mengatasi, identitas, ideologi dan orientasi tindakan.³³

Deradikalisis yang efektif biasanya harus dirancang secara spesifik tergantung proses radikalisis yang terjadi terhadap individual yang berfokus kepada faktor psikologis yang menjadi motivasi atau pendorong dalam tindakan orang-orang yang dianggap diradikalisis. Metode deradikalisis yang dilakukan bertujuan untuk menimbulkan perubahan secara individual dalam motivasi dan komitmen mereka agar mereka sadar bahwa tindak kekerasan tidak harus dilakukan untuk mencapai apapun yang ingin mereka capai. Biasanya individu

³³ Daniel Koehler, *Understanding Deradicalization: Methods, Tools and Programs for Countering Violent Extremism*, (New York: Routledge, 2017), 80.

diberikan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami dan bagaimana cara mengatasinya. Dari metode ini diharapkan individu yang terkena radikalisasi dapat mengubah cara berpikir, nilai-nilai dan ideologinya secara berangsur-angsur.³⁴ Kebanyakan target dari program deradikalisasi biasanya adalah teroris berkedudukan tinggi, ekstremis kekerasan, radikal dan individu yang dianggap mengkhawatirkan. Partisipan dalam program deradikalisasi merupakan individu yang telah melakukan tindak kekerasan atau penyerangan yang berbahaya dan mereka diharapkan dapat lepas dari ideologi yang mereka anut dan melewati proses deradikalisasi.³⁵

Selain itu muncul juga tuduhan-tuduhan bahwa kebijakan tersebut bersifat *Islamophobic* dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan ini juga disebut demikian. Ada beberapa definisi dari *Islamophobia*, definisi pertama dirumuskan oleh Salman Sayyid dan Abdool Karim Vakil yang menyatakan bahwa *Islamophobia* adalah satu bentuk rasisme dan target dari rasisme tersebut adalah ekspresi atau hal apapun yang dianggap bersifat Muslim.³⁶ Sedangkan definisi kedua diambil dari buku Christopher Allen yang berjudul *Islamophobia*. Allen merumuskan definisi baru dari *Islamophobia* dalam bukunya, *Islamophobia* merupakan sebuah ideologi yang condong pada tindakan rasisme terhadap segala hal yang bersifat Muslim atau Islam yang terus mempengaruhi tindakan, interaksi dan respons sosial secara negatif dan mengkonstruksi sebuah persepsi mengenai

³⁴ Daniel Koehler, *Understanding Deradicalization: Methods, Tools and Programs for Countering Violent Extremism*, (New York: Routledge, 2017), 81-82.

³⁵ *Ibid*, 83.

³⁶ Rangkuman dari kutipan langsung "*Islamophobia is a type of racism that targets expressions of Muslimness or perceived Muslimness*". Salman Sayyid dan Abdool Karim Vakil, *Thinking Through Islamophobia: Global Perspectives*, (New York: Columbia University Press, 2010).

kaum Muslim dan Islam sebagai kaum lain (*Other*).³⁷ Kedua definisi tersebut dapat membantu mendeskripsikan perilaku *Islamophobia* yang terjadi di antara masyarakat Inggris.

Munculnya perilaku *Islamophobia* di Inggris tidaklah tiba-tiba, perilaku ini telah berakar pada masyarakat Inggris sejak dahulu. *Social Identity Theory* (SIT) menjelaskan mengapa masyarakat Inggris memiliki persepsi dan perilaku tersebut. Menurut SIT, konsep diri manusia berasal dari kelompok darimana mereka berasal.³⁸ Pengertian tersebut membantu menjelaskan bagaimana pandangan kelompok non-Muslim terhadap kelompok Muslim di Inggris terbentuk melalui latar belakang budaya, sosial berdasarkan kelompok asal mereka. Menurut Henri Tajfel dan John C. Turner, ketika seseorang menganggap dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok, maka kelompok itu akan menjadi sebuah "*in-group*" bagi mereka dan akan terjadi polarisasi antara dua kelompok yaitu "*in-group*" dan "*out-group*". Setiap manusia melewati beberapa proses dalam mengidentifikasi pandangan mereka terhadap kelompok mana yang akan mereka jadikan kelompok "*in-group*" atau "*out-group*" mereka. Ada tiga proses dalam pembentukan pandangan individu mengenai kelompok identitas mereka, ketiga proses itu berupa: *social categorization*, *social identification* dan *social comparison*.³⁹

Melalui *social categorization*, individu menentukan "*in-group*" sesuai identitas kelompok mereka dan kecenderungan mereka ketika telah

³⁷ Christopher Allen, *Islamophobia*, (Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2010), 190.

³⁸ Henri Tajfel and John C. Turner, "The Social Identity Theory of Intergroup Behavior," *Political Psychology* (2004): 279, doi:10.4324/9780203505984-16.

³⁹ *Ibid*, 281-285.

mengidentifikasi diri dalam suatu kelompok adalah membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain secara tidak sadar maupun tidak sadar. Proses ini merupakan suatu proses kognitif alami dalam persepsi individu mengenai penempatan dirinya dan juga individu lain dalam kelompok sosial. Biasanya kategorisasi dilakukan menurut ras, penampilan, kelamin dan sebagainya; stereotipe dipakai untuk membuat kategorisasi lebih mudah. Kecenderungan individu dalam mengingat hal-hal positif dari kelompoknya akan meningkat dan mereka akan lebih sadar pada hal-hal negatif dari kelompok lain.⁴⁰

Proses selanjutnya merupakan *social identification* atau identifikasi sosial dimana kelompok sosial seorang individu yang muncul dari hasil kategorisasi sosial menjadi sebuah identitas yang diambil oleh individu. Dalam identifikasi sosial, individu mengangkat keanggotaannya dalam kelompok sosial sebagai konsep diri mereka. Kelompok sosial mereka menjadi salah satu penentu identitas diri mereka. Setelah individu berhasil mengidentifikasi diri mereka melalui kelompok sosial dari hasil kategorisasi sosial, maka mereka akan melanjutkan ke proses *social comparison* atau perbandingan sosial. Dalam tahap ini, kelompok sosial yang telah menjadi identitas dari individu mempunyai ciri-ciri tertentu dan individu akan melihat perbedaan ini dan membandingkan kelompok sosial mereka dengan kelompok sosial yang lainnya. Individu akan membandingkan nilai-nilai, kepercayaan, cara hidup dan sebagainya “*in-group*” darimana mereka berasal dengan “*out-group*” yang mempunyai perbedaan dalam setiap aspek tersebut.⁴¹

⁴⁰ Henri Tajfel and John C. Turner, "The Social Identity Theory of Intergroup Behavior," *Political Psychology* (2004): 283-285, doi:10.4324/9780203505984-16.

⁴¹ Henri Tajfel and John C. Turner, "The Social Identity Theory of Intergroup Behavior," *Political Psychology* (2004): 284-285, doi:10.4324/9780203505984-16.

Melalui teori ini, dapat diperhatikan bahwa individu-individu non-Muslim di Inggris secara tidak resmi membentuk suatu kelompok “*in-group*” mereka yaitu kelompok non-Muslim dan bagi mereka kelompok lainnya atau kelompok “*out-group*” merupakan kelompok Muslim. Individu dalam kasus ini mengkategorisasikan dan mengidentifikasi diri mereka dalam aspek agama dan mereka tidak memperdulikan aspek kewarganegaraan yang sebenarnya dapat juga diperhitungkan dalam mengidentifikasi identitas sosial mereka dalam kelompok masyarakat. Dikarenakan perbedaan yang ada antara agama yang dianut oleh kedua kelompok ini di Inggris, muncullah perbandingan antara kelompok yang menghasilkan stigma-stigma buruk.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisa *Prevent Strategy* melalui teori sekuritisasi dan melihat pembuatan kebijakan tersebut melalui NSP. Terorisme telah didefinisikan agar dapat mengklasifikasi aksi-aksi penyerangan yang terjadi di Inggris. Penyebab kebijakan ini tidak mencapai tujuannya berhubungan dengan perilaku *Islamophobia* ditelusuri lebih dalam dengan konsep radikalisisasi dan definisi *Islamophobia*. Definisi *Islamophobia* dapat mendeskripsikan inkonsistensi yang ada dalam *Prevent Strategy* dan juga perilaku-perilaku masyarakat Inggris yang diskriminatif terhadap kaum Muslim. Terakhir, SIT dipakai untuk memaparkan mengakarnya *Islamophobia* dalam masyarakat Inggris.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode penelitian kualitatif. Metode ini dapat digunakan untuk membantu penelitian dan mendeskripsikan fenomena yang diangkat oleh penulis. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang sering digunakan oleh akademisi Hubungan Internasional dalam melakukan penelitian dan menganalisa suatu masalah.⁴² Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif merupakan suatu metode untuk memahami dan mengeksplorasi makna; tujuan dari penelitian bersifat kualitatif adalah untuk menemukan makna atau konteks dari sebuah perilaku atau interaksi sosial. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data-data verbal yang dapat berupa gambar, grafik atau objek; objek penelitian juga dibatasi dan hasil yang diharapkan juga adalah laporan yang bersifat verbal.⁴³ Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian deskriptif karena data-data yang telah dikumpulkan dianalisis dan mengeluarkan hasil penelitian yang memaparkan mengapa fenomena tersebut terjadi.⁴⁴

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik pengkajian berbasis literatur dan internet. Penulis menggunakan kedua teknik ini

⁴² Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 60-61.

⁴³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (Los Angeles: Sage, 2014), 185.

⁴⁴ Vickie A. Lambert dan Clinton E. Lambert, "Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design," *Pacific Rim International Journal of Nursing Research* 16, no.4 (2012): 255-256, ISSN: 2586-8373.

untuk mencari referensi dan data yang dibutuhkan untuk melangsungkan penelitian. Dengan kedua teknik ini, penulis dapat mencari tahu informasi yang bersangkutan dengan aksi terorisme dan isu *Islamophobia* yang terjadi di Inggris tanpa harus mengeluarkan dana atau tenaga yang besar untuk langsung mendapatkan data tersebut.⁴⁵ Literatur yang dipakai berupa buku, jurnal artikel dan artikel untuk mencari data-data yang kredibel. Bentuk literatur dapat berupa buku fisik atau e-book (*electronic book*), jurnal artikel yang didapat juga dapat berbentuk *online*. Dari teori yang sudah ada, penulis menganalisa data-data yang sudah diperoleh dan membuat suatu hasil penelitian.

1.7.Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab. Bab-bab tersebut berisi penjelasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bagian ini, penulis mendeskripsikan latar belakang mengenai permasalahan *Prevent Strategy* yang diimplementasikan oleh pemerintah Inggris sebagai salah satu kebijakan kontra-terorisme. Kebijakan yang diharapkan berhasil terbukti tidak mencapai tujuannya mengurangi serangan terorisme yang terjadi pada tahun 2017. Penulis juga hanya membahas permasalahan yang terjadi di Inggris dalam tahun 2017. Kajian literatur dilakukan untuk memberi referensi bagi penulis yang mengacu pada *Prevent Strategy*, setelah itu dibuatlah kerangka penelitian yang memaparkan teori, konsep dan definisi yang dipakai. Di akhir,

⁴⁵ Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, 175.

penulis mendeskripsikan metode penelitian yang akan dipakai dan juga sistematika pembahasan dari keseluruhan penelitian.

Bab II: Proses sekuritisasi terhadap ancaman terorisme di Inggris

Pada bagian ini, penulis memakai teori sekuritisasi untuk memaparkan proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris pada tahun 2017. Proses sekuritisasi terhadap ancaman terorisme di Inggris dibahas dengan mengidentifikasi *securizing actor*, *threat*, *audience*, *speech act* dan *referent object* yang ada. Isi dari CONTEST akan dijelaskan secara singkat dan isi dari *Prevent Strategy* juga akan dijelaskan dalam bab ini.

Bab III: Faktor Kegagalan Implementasi *Prevent Strategy*

Pada bagian ini, penulis memaparkan penyebab kegagalan *Prevent Strategy* dalam mencapai tujuannya walaupun telah diimplementasikan secara formal semenjak tahun 2015. Penulis membahas isi dari *Prevent Strategy* dan menginkorporasikan kerangka NSP untuk memaparkan bagaimana kebijakan tersebut tidak mencapai tujuannya. Tidak tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut berdampak dalam terpicunya perilaku *Islamophobia* yang telah berakar dalam masyarakat Inggris sejak dulu. Mengakarnya perilaku *Islamophobia* antar kelompok non-Muslim terhadap kaum Muslim di Inggris dijelaskan dengan SIT.

Bab IV: Kesimpulan

Pada bagian ini, penulis menyimpulkan seluruh penelitian berdasarkan data, teori dan analisis yang telah dikumpulkan dan dibuat. Hasil dari penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian yang telah dibuat oleh penulis.